

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Untuk melindungi tenaga kerja akhirnya Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai program pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan telah bekerja melayani para pekerja dengan baik namun banyaknya perusahaan yang mempunyai tenaga kerja terkadang belum mendaftarkan pekerjanya kedalam BPJS Ketenagakerjaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Faktor - faktor apakah yang menjadi penghambat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)? dan 2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Ketenagakerjaan dalam proses melakukan perlindungan terhadap Tenaga Kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Tenaga Kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan telah bekerja melayani para pekerja dengan 4 program yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Faktor penghambat dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh BPJS Ketenagakerjaan ada 2 yaitu internal dan eksternal. Faktor Internalnya adalah proses administrasi yang terlalu panjang, kurang terampilnya SDM, data dan dana perusahaan mitra BPJS Ketenagakerjaan dan fasilitas yang kurang memadai. Faktor Eksternalnya adalah kurangnya pemahaman pengusaha, dana perusahaan terbatas, perusahaan belum mendaftar semua program dan perusahaan yang masih mendaftarkan pekerjanya hanya sebagian. Saran diharapkan BPJS Ketenagakerjaan mengoptimalkan kerja programnyadan meningkatkan kualitas layanannya dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.

Kata kunci : Perlindungan, Tenaga Kerja, BPJS

ABSTRACT

LAW PROTECTION LABOR BY EMPLOYEE SOCIAL SECURITY AGENCY BASED ON LAW NO. 24 OF 2011 ABOUT SOCIAL GUARANTEE AGENCY

To protect the workforce, the Indonesian government finally made Law No. 24 of 2011 concerning BPJS Employment. As a government program, BPJS Employment has been working to serve the workers well but many companies that have workers sometimes do not register workers in the BPJS Employment. Problems in this study are: 1. What factors are obstacles to the Social Security Organizing Board (BPJS)? and 2. How is Labor Legal Protection by the Manpower Social Security Organizing Agency (BPJS) based on Law No. 24 of 2011 Manpower in the process of protecting Workers. This research uses a normative approach. The types of data are primary data and secondary data. The results of this study indicate that the Workers' Legal Protection by BPJS Employment has worked to serve workers with 4 programs namely work accident insurance, old age insurance, pension insurance, and death insurance. There are 2 inhibiting factors in the Protection of Labor Law by BPJS Employment, namely internal and external. Internal factors are the administrative process that is too long, lack of skilled human resources, data and funds of BPJS Employment partner companies and inadequate facilities. External factors are the lack of understanding of employers, limited company funds, companies have not registered all programs and companies that still register only partial employees. Suggestions are expected BPJS Employment to optimize the work program and improve the quality of its services in providing protection to the workforce.

Keyword : Protection, Labor, BPJS